

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Deddy Mulyadi, M. D. (2018). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*.

Bandung: Alfabeta CV.

Harbani Pasolong, M. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Hardiyansyah, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik dan Pengembangan Organisasi*

*Publik Dalam Perspektif Riset Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*.

Yogyakarta: Gava media

Hardiyansyah, M. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Ibrahim, A., 2008. *Pengaruh Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*.

Bandung: Mandar Maju

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat

Cendekia.

Sinambela, L.P. dkk., 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan*

*Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Jurnal:

Agustin, G. S. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS).

Bustan, R., & Sutiasasmitha, E. (2018). Pengabdian Kepada Masyarakat Pelayanan Konseling Individu dan Kelompok pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(4), 236-250.

Fachrezi, F. B., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 363-376.

Fitriani, F., Mahsyar, A., & Rasdiana, R. (2021). Responsivitas Pelayanan Publik Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 337-352.

Komul, F. E. (2019). Responsivitas Pelayanan Publik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Kurniasih, L. W., & Widowati, N. (2016). Pelayanan Publik Dalam Menciptakan Pelayanan Prima Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 294-305.

- M.Said, Z. (2017). Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makasar). Universitas Hasanudin.
- Martins, L. D. J., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2015). kebijakan pelayanan kepada narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasarakatan Gleno Municipio Ermera Timor-Leste. *Reformasi*, 5(2), 306-320.
- Mutfi.R.(2016).Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa.Universitas Muhammadiyah Makassar
- Nurwah, D.(2019).Responsivitas Dalam Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Putra, B. M. (2018). Analisis Pelayanan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam: Indonesia. *Dialektika Publik*, 3(1), 22-30.
- Sutrisno, E. D. (2021). Kinerja Pelayanan Pembinaan Kepada Warga Binaan Pemasarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. *JI@ P*, 10(1).
- Sutrisno, E., & Mariyono, J. (2016). Pengaruh Kualitas Pepelayanan DAN Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat (Keluarganya Warga Binaan Pemasarakatan) Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Slawi. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 1(1).

Dokumen:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003  
tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah No, 57 Tahun 1999 tentang pembinaan kemandirian

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pembinaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1

Undang-Undang No.12 Pasal 1 Angka 3 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan  
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik

Undang-Undang No.25 Pasal 4 Tahun 2009 tentang Asas-asas Pelayanan Publik

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang kemasyarakatan

Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (7 dan 8) Undang-Undang Nomor  
12 Tahun 1995 tentang narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1995  
tentang Hak Narapidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Pasal 10 Ayat 1 Tahun 2005  
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Internet:

Web            Lapas            Perempuan            Kelas            IIA            Bandung

<https://lppbandung.kemenkumham.go.id/>